



Beranda > Opini >

Pajak Akan Naik: Bagaimana Sebaiknya Merespon?



Warta Kita

Maret 19, 2024



sumber : keuanganonline.id

SINYAL kenaikan pajak pertambahan nilai muncul dari pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto minggu lalu.

Pajak pertambahan nilai (PPN) diperkirakan naik dari 11 persen saat ini menjadi 12 persen tahun depan.

Isu kenaikan pajak seringkali bisa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Kenaikan pajak seringkali langsung dikaitkan dengan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, kenaikan PPN dikorelasikan dengan adanya kenaikan harga barang yang menjadi objek PPN. Akibatnya, pembeli barang tersebut perlu mengeluarkan uang lebih banyak untuk memperoleh produk tersebut dalam jumlah yang sama.

Namun pertanyaannya, apakah kenaikan pajak akan selalu mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Mari kita tilik terlebih dahulu!

Ada apa di balik kenaikan pajak?

Pajak sebenarnya bukan hanya sekadar pungutan dari negara. Setelah negara menarik pajak dari masyarakat, pajak tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk menghasilkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti jalan raya dan fasilitas umum, atau layanan pemerintah. Barang atau layanan tersebut seringkali disebut barang publik.

Pajak sendiri merupakan sumber utama penerimaan pemerintah. Sementara itu, penerimaan pemerintah yang memadai menjadi faktor yang menentukan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Ketika tidak ada sumber penerimaan yang memadai, dalam artian pengeluaran pemerintah lebih kecil daripada penerimaan pemerintah, atau yang seringkali disebut defisit fiskal, pemerintah akan mengalami penurunan kemampuan untuk menyediakan barang dan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini tentunya berpotensi mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Kenaikan PPN memang sudah direncanakan sebagai salah satu sarana untuk mendorong peningkatan penerimaan pemerintah. Kenaikan pajak ini tentunya tidak berorientasi menurunkan kesejahteraan masyarakat. Namun justru untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses peningkatan penerimaan pendapatan negara, pengurangan defisit fiskal, dan perbaikan penyediaan layanan publik. Peningkatan kesejahteraan mungkin tidak bisa dirasakan secara langsung saat pemungutan pajak, namun dapat dirasakan beberapa saat setelahnya.

Alternatif pembiayaan defisit fiskal selain pajak

Seperti disampaikan sebelumnya, kondisi defisit fiskal berimplikasi pada pengurangan kapasitas pemerintah menyediakan barang dan layanan publik. Kenaikan pajak menjadi salah satu sarana untuk mengurangi defisit fiskal.

Meskipun demikian, kenaikan pajak sebenarnya bukan menjadi satu-satunya cara untuk mengurangi defisit fiskal. Alternatif lain untuk mengurangi defisit fiskal adalah melalui utang pemerintah (baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri) serta pencetakan uang.

Utang pemerintah berarti pemerintah meminjam uang dari pemilik modal di dalam negeri maupun luar negeri. Utang pemerintah Indonesia misalnya dilakukan melalui penerbitan Surat Utang Negara yang bisa dibeli masyarakat domestik maupun asing serta berbagai pinjaman dari swasta, negara tertentu (bilateral), kelompok negara tertentu (multilateral), atau lembaga internasional. Sementara itu, pencetakan uang hanya bisa dilakukan oleh otoritas moneter (otoritas moneter di Indonesia adalah Bank Indonesia).

Dari ketiga alternatif pembiayaan defisit fiskal yang disebutkan di atas (pajak, utang, dan pencetakan uang), masing-masing tentunya memiliki implikasi masing-masing. Kenaikan pajak pada saat tertentu mungkin akan berimplikasi pada penurunan kesejahteraan pada waktu tersebut, namun akan membawa kesejahteraan di masa selanjutnya.

Sebaliknya, utang pemerintah pada saat tertentu memang tidak mengurangi kesejahteraan masyarakat pada waktu tersebut. Namun demikian, pada masa selanjutnya, pemerintah harus membayar pokok dan bunga utang.

Pembayaran pokok dan bunga utang ini bisa jadi akan dibiayai melalui peningkatan pajak di masa selanjutnya sehingga akan terjadi pengurangan kesejahteraan masyarakat karena peningkatan pajak pada masa selanjutnya.

Terkait alternatif ketiga berupa pencetakan uang, pencetakan uang ternyata tidak netral dari risiko. Pencetakan uang berakibat pada jumlah uang beredar yang terlalu banyak. Jumlah uang beredar yang terlalu banyak bisa menyebabkan harga-harga barang secara umum akan naik atau yang biasa disebut inflasi.

Kenaikan harga barang tersebut akan membuat kemampuan masyarakat membeli barang menurun. Ketika daya beli masyarakat menurun, maka kemampuan masyarakat mengkonsumsi akan menurun. Hal ini menjadi bentuk penurunan kesejahteraan masyarakat.

Penjelasan di atas mengajak kita untuk tidak langsung khawatir atau panik ketika ada isu kenaikan pajak. Pertama, kenaikan pajak sebenarnya menjadi sarana untuk memperbaiki penyediaan barang dan layanan publik. Kedua, penurunan kesejahteraan karena pajak pada waktu tertentu akan dikompensasi dengan peningkatan kesejahteraan di masa mendatang. Ketiga, dilihat dari implikasinya, pajak merupakan salah satu mekanisme alternatif yang tidak kalah baiknya dengan alternatif lainnya dalam pembiayaan defisit fiskal pemerintah.



Stephanus Eri Kusuma

Dosen Program Studi Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Editor: L Sukamta

SEBARKAN